

STRATEGI PENINGKATAN MUTU DI ERA OTONOMI PENDIDIKAN

Mukhsin

Abstrak. Strategi merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tidak terkecuali mengenai pendidikan. Dalam hal ini penulis ingin memberikan wawasan atau pandangan kepada pembaca, pengamat, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk memahami bagaimana menemukan solusi terbaik dalam mengembangkan kualitas pendidikan di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen, yaitu: tata pemerintahan yang baik, internal dan efisiensi eksternal pendidikan. Melalui penerapan tiga pendekatan diharapkan dapat: (1) pengembangan kapasitas lembaga dan semua program di bidang pendidikan dapat dilaksanakan, (2) pengembangan kualitas pendidikan melalui input, proses, dan output berdasarkan pada otonomi daerah, (3) manfaat dan dampak hasil pengembangan pendidikan dasar terhadap otonomi daerah.

Kata kunci : Strategi, mutu, otonomi pendidikan

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengatur tentang pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam wujud otonomi daerah. Pada pasal 11 UU no. 22 tahun 1999 mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan yaitu pekerjaan umum, kesehatan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertambangan, koperasi, tenaga kerja serta pendidikan dan kebudayaan.

Peningkatan mutu pendidikan selama ini belum sesuai dengan harapan karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah strategi pembangunan pendidikan yang lebih bersifat "*input oriented*" dan bersifat "*macro oriented*" yang cenderung diatur oleh birokrasi ditingkat pusat

Institusi pendidikan masih mengandalkan pola manajemen lama yang dianggap kurang efektif dan efisien sehingga hasilnya kurang maksimal, seharusnya dikembangkan pola manajemen pada kepuasan pelanggan, artinya bahwa mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui penerapan manajemen mutu atau total quality management.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah melalui otonomi pendidikan dengan pendekatan yang jelas, terarah, serta berhasil guna, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam otonomi pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimanakah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan pada era otonomi pendidikan?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Yaitu mendeskripsikan permasalahan yang ada yang masih terjadi sampai saat sekarang atau waktu yang lalu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung, kajian literatur dari berbagai sumber, dan interview. Sedang metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian otonomi pendidikan

Pada dasarnya otonomi juga berarti mampu untuk menentukan sendiri keinginan dan kebutuhannya sendiri yang dipandang sesuai dengan keberadaannya selaku insan atau instansi yang bebas mengatur dirinya sendiri.

Pengertian otonomi bersifat multidimensional, artinya otonomi berlaku dalam berbagai aspek kebutuhan dan sektor kehidupan antara lain : kebutuhan individu atau berkeluarga dalam menentukan lokasi tempat kediaman, menentukan jenis makanan, mencari dan menentukan jodoh, menentukan bentuk dan lokasi rumah tinggal, melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat lain dan yang lebih penting lagi otonomi dalam

menentukan bentuk jenis dan jenjang pendidikan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi pendidikan adalah bagaimana setiap daerah dapat mengelola pendidikan sesuai keinginan dan kemampuannya.

2. Pengertian mutu pendidikan

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai standar ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Adapun dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya misalnya hasil tes prestasi belajar.

Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.

3. Komponen mutu pendidikan

Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan adalah pertama, kesiapan dan motivasi siswa. Kedua, kemampuan guru profesional dan kerjasama dalam organisasi sekolah. Ketiga, kurikulum meliputi relevansi isi dan operasional proses pembelajarannya. Keempat, sarana dan prasarana meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Kelima, partisipasi masyarakat (orang tua, pengguna lulusan dan perguruan tinggi) dalam pengembangan program-program pendidikan sekolah.

4. Pendekatan mutu pendidikan

Pendekatan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu pertama, perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*). Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggara pendidikan telah

mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Konsep ini senantiasa memperbaharui proses pendidikan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Jika tuntutan dan kebutuhan pelanggan berubah, maka pihak pengelola institusi pendidikan dengan sendirinya akan merubah mutu, serta selalu memperbaharui komponen produksi atau komponen-komponen yang ada dalam institusi pendidikan.

Kedua, menentukan standar mutu (*quality assurance*). Paham ini digunakan untuk menetapkan standar-standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan. Standar mutu pendidikan misalnya dapat berupa pemilikan atau akuisisi kemampuan dasar pada masing-masing bidang pembelajaran, dan sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain itu, pihak manajemen juga harus menentukan standar mutu materi kurikulum dan standar evaluasi yang akan dijadikan sebagai alat untuk mencapai standar kemampuan dasar.

Standar mutu proses pembelajaran harus pula ditetapkan, dalam arti bahwa pihak manajemen perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang diharapkan dapat berdaya guna untuk mengoptimalkan proses produksi dan untuk melahirkan produk yang sesuai, yaitu yang menguasai standar mutu pendidikan berupa penguasaan standar kemampuan dasar. Pembelajaran yang dimaksud sekurangnya memenuhi karakteristik; menggunakan pendekatan pembelajaran pelajar aktif (*student active learning*), pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, pembelajaran konstruktif, dan pembelajaran tuntas (*master learning*).

Ketiga, perubahan kultur (*change of culture*). Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasi. Jika manajemen ini ditetapkan di institusi pendidikan, maka pihak pimpinan harus berusaha membangun kesadaran para anggotanya, mulai dari pemimpin, staf, guru, siswa, dan berbagai unsur terkait, seperti pemimpin yayasan, orang tua, dan para pengguna lulusan pendidikan

akan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan mutu pembelajaran, baik mutu hasil maupun proses pembelajaran.

Keempat, perubahan organisasi (*upsidedown organization*). Jika visi dan misi, serta tujuan organisasi sudah berubah atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini bukan berarti perubahan wadah organisasi, melainkan sistem atau struktur organisasi yang melambangkan hubungan-hubungan kerja struktur organisasi dan pengawasan dalam organisasi. Perubahan ini menyangkut perubahan kewenangan, tugas-tugas dan tanggung jawab. Misalnya, dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, struktur organisasi dapat berubah terbalik dibandingkan struktur konvensional. Jika dalam struktur konvensional berturut-turut dari atas ke bawah; senior manager, middle manager, teacher dan support staff; sedangkan struktur yang baru, berupa struktur organisasi layanan dari atas kebawah berturut-turut; learner, team, teacher and support, staff, dan leader.

Kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping close to the customer*). Karena organisasi pendidikan menghendaki kepuasan pelanggan, maka perlunya mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi sangat penting. Dan inilah yang dikembangkan dalam unit public relations. Berbagai informasi antara organisasi pendidikan dan pelanggan harus terus-menerus dipertukarkan, agar institusi pendidikan senantiasa dapat melakukan perubahan-perubahan atau improvisasi yang diperlukan, terutama berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan serta kebutuhan pelanggan. Bukan hanya itu, pelanggan juga diperkenankan melakukan kunjungan, pengamatan, penilaian dan pemberian masukan kepada institusi pendidikan. Semua masukan itu selanjutnya akan diolah dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu proses dan hasil-hasil pembelajaran. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam manajemen berbasis sekolah, guru dan staf justru dipandang sebagai pelanggan internal, sedangkan pelajar, termasuk orang tua pelajar dan masyarakat umum, termasuk pelanggan eksternal. Maka,

pelanggan baik internal maupun eksternal harus dapat terpusatkan melalui interval kretatif pimpinan institusi pendidikan.

5. Penerapan prinsip good governance

Prinsip-prinsip

asuhan/bimbingan/penyuluhan yang baik dan benar (*good governance*) dapat diterapkan melalui beberapa hal :

- a. Akuntabilitas (adanya rasa tanggung jawab)
- b. Keterbukaan (transparansi)
- c. Membuka peran serta semua pihak (partisipasi)
- d. Kesederajatan/kesetaraan (equality)
- e. Kepekaan/kesegaran merespon (responsiveness) terhadap semua tuntutan pelayanan/pelaksanaan yang wajib dan rasional.
- f. Pentaatan/pelaksanaan hukum (rule of law)
- g. Efisiensi dan efektifitas dalam menentukan setiap pekerjaan.
- h. Visi strategik/memandang jauh ke depan dalam hal-hal yang paling strategik dan menentukan.
- i. Profesionalisme dalam melakukan semua pekerjaan.
- j. Entrepreneurship dalam setiap melakukan pekerjaan secara kreatif, berani memikul risiko yang tak dapat diasuransikan, siap menghadapi perubahan dan memandang jauh ke depan.
- k. Budaya organisasi terdiri dari prinsip menjunjung nilai-nilai organisasi pemerintahan daerah, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan dan seluruh aparatur penyelenggara otonom daerah/otonom pendidikan, sebagai wadah pengembangan nilai-nilai kebersamaan, koordinasi dan keterpaduan kerja; kepedulian terhadap visi, misi, tujuan, fungsi, arah, strategi, kebijakan dan program-program yang sudah menjadi keputusan bersama.
- l. Budaya kerja mencermati seluruh uraian, wewenang, dan tanggung jawab secara tepat waktu, tepat perilaku, tepat orang, tepat jabatan (*the right man in the right place*), tepat sasaran, tepat anggaran.

Dengan pemberlakuan prinsip-prinsip *good governance* dalam melaksanakan upaya

pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan juga otonomi pendidikan, maka diharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja manajemen otonomi pendidikan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi pendidikan juga harus diupayakan agar seluruh jajaran yang berkiprah dan mengabdikan di dunia pendidikan ikut serta melaksanakan prinsip-prinsip tersebut sebagai kaidah normative yang harus secara sadar dan tanpa pamrih mampu melaksanakannya. Secara tidak langsung prinsip-prinsip pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tersebut termasuk prinsip-prinsip "good governance" yang juga menjadi pedoman kerja dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas di sector pendidikan khususnya manajemen otonomi pendidikan. Secara wajar hal-hal tersebut juga dengan sendirinya berlaku bagi seluruh aparatur pendidikan (kepala sekolah, wali kelas, guru, guru pembimbing, dan penyuluh pendidikan, penilik dan pengawas pendidikan, dinas pendidikan) yang melaksanakan manajemen otonomi pendidikan di semua wilayah dan dimanapun lembaga itu berada.

Dalam realitas penyelenggaraan otonomi pendidikan program inti dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pada hakikatnya juga upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua bentuk, jenjang, dan jenis pendidikan.

Komitmen/kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan menjadi keharusan bagi setiap daerah di seluruh Republik Indonesia. Selama hampir empat dasa warsa sejak tahun 1960 memang secara kuantitatif pendidikan di Indonesia sudah berkembang.

Data menunjukkan peningkatan jumlah-jumlah lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi secara signifikan. Namun peningkatan jumlah tersebut tidak disertai peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu wajar bila desentralisasi dan otonomi pemerintahan berikut penyelenggaraan otonomi pendidikan juga

membawa misi dan tugas untuk meningkatkan mutu pendidikan.

6. Penerapan aspek efisiensi internal pendidikan

Upaya untuk meningkatkan efisiensi internal pendidikan mengharuskan para manajer otonomi pendidikan memfokuskan perhatiannya pada tiga hal:

- a. Faktor *input* pendidikan
- b. Faktor proses pendidikan
- c. Faktor *output* pendidikan

Dari ketiga faktor efisiensi internal pendidikan tersebut maka faktor-faktor tersebut yang meliputi Unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur SDM berupa jumlah dan mutu guru, pelatih, instruktur dan semua orang yang berfungsi sebagai fasilitator pendidikan
- 2) Unsur mutu dan peran serta *stake holders* pendidikan (peserta didik, siswa, orang tua, peran serta masyarakat)
- 3) Unsur pendanaan/pembiayaan pendidikan yang memungkinkan semua program pendidikan di lembaga pendidikan/ sekolah dapat berlangsung.
- 4) Unsur prasarana dan sarana (tanah, bangunan gedung, perpustakaan sekolah, laborototium, pusat sumber belajar)
- 5) Unsur teknologi yang diterapkan dan deprogram serta dimiliki oleh lembaga pendidikan seperti: sarana computer, media pembelajaran, orientasi guru terhadap penerapan teknologi.
- 6) Unsur kurikulum/program pendidikan berikut seluruh agenda dan program pendidikan dan pembelajaran yang diberlakukan di lembaga pendidikan
- 7) Unsur lingkungan lembaga pendidikan baik lingkungan alam (gunung, bukit, lembah, pantai, pedalaman, hutan, persawahan, pertambakan, dsb)
- 8) Unsur reputasi dan prestasi lembaga pendidikan yang memicu dan mendorong semangat belajar para siswa dan masyarakat sekitarnya.
- 9) Unsur waktu belajar dan pembelajaran yang sesuai dengan rancangan kurikulum dan agenda/program pembelajaran.

Unsur input ini sangat menentukan bagi kelangsungan faktor berikutnya yaitu faktor

proses pendidikan (belajar dan pembelajaran) yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur model pendekatan dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Unsur pendayagunaan waktu tersedia secara efisien dan efektif.
- 3) Unsur orientasi dan wawasan belajar dan pembelajaran yang disosialisasikan di kelas dan dalam forum belajar mengajar.
- 4) Unsur pendayagunaan kurikulum dan ekstra kurikulum di dalam dan di luar proses belajar mengajar.
- 5) Unsur paradigma baru yang diterapkan dalam pendekatan belajar dalam arti belajar yang lebih inovatif, kreatif, adaptif, dan generik.

Faktor input dan proses akan menentukan faktor output yang juga meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu atau lebih cepat dari waktu program belajar dan pembelajaran yang ditetapkan.
- 2) Hasil pendidikan dan lulusan siap kerja melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya.
- 3) Para orang tua dan seluruh stake holders pendidikan merasakan hasilnya sesuai yang diharapkan.
- 4) Para lulusan berhasil mendapatkan predikat kelulusan sesuai tuntutan kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan program.
- 5) Jumlah peserta didik yang tak berhasil sangat minim dibandingkan mereka yang berhasil.
- 6) Hasil/output pendidikan dicapai dengan biaya yang sesuai dengan norma-norma efisiensi, efektifitas, dan produktifitas.

Kesemua hal yang diuraikan di atas adalah merupakan pembahasan tentang efisiensi internal pendidikan.

7. Penerapan Aspek efisiensi eksternal pendidikan

Aspek ini juga sangat menentukan pencapaian mutu pendidikan yang meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor manfaat/kegunaan (*benefit*) output pendidikan

- b. Faktor dampak atau pengaruh (*impact*) hasil pendidikan

Faktor manfaat hasil pendidikan terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- 1) Manfaat bagi stake holders pendidikan (peserta didik, orang tua, masyarakat, dunia usaha, pengguna lulusan pendidikan.
- 2) Manfaat dunia kerja dan pasar kerja dalam memenuhi SDM yang siap pakai, kompeten, dan bermutu.
- 3) Manfaat bagi lembaga pendidikan sebagai bukti pencapaian reputasi yang positif selaku lembaga penghasil SDM yang bermutu.
- 4) Manfaat bagi daerah/wilayah dengan tersedianya SDM yang lebih terdidik (*better well educated human resources*)

Faktor dampak hasil lulusan adalah segala bentuk, dampak, pengaruh, dan konsekuensi output lulusan lembaga pendidikan terhadap:

- 1) Kehidupan sosial masyarakat
- 2) Kehidupan kultural
- 3) Kehidupan ekonomi
- 4) Kehidupan politik lokal/nasional
- 5) Kehidupan keamanan/ketentraman masyarakat

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek, faktor-faktor, unsur-unsur, komponen-komponen, pendekatan-pendekatan yang menentukan mutu pendidikan sangat luas, kompleks, dan rumit. Disinilah timbul tantangan yang cukup luas dan kompleks bagi para para pengelola institusi pendidikan untuk menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya bagi peningkatan mutu pendidikan di wilayah masing-masing.

KESIMPULAN

Dari beberapa pendekatan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam mengelola institusi untuk peningkatan mutu pendidikan di setiap daerah dan wilayah di seluruh Republik Indonesia :

1. Upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dengan berpedoman kepada 8 tema dan prinsip good governance yang menjadi kaidah yang

normative untuk merealisasikan seluruh program desentralisasi dan otonomi daerah khususnya bidang pendidikan.

2. Upaya penerapan aspek efisiensi internal pendidikan dengan fokus : input, proses dan output.
3. Upaya penerapan aspek eksternal pendidikan dengan memperhatikan faktor manfaat dan dampak dari hasil pendidikan.
4. Upaya merealisasikan komponen dan prinsip-prinsip yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.
5. Upaya memperhatikan pendekatan-pendekatan dalam peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro, Jaromes, 2001. *Pendidikan Berbasis Mutu; Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Darmaningtyas, dkk, 2004. *Membongkar Ideologi Pendidikan; Jelajah Undangundang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta : Ar-Ruzz. Media.
- Engkoswara & Aan Komariah, 2010. *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Imam Chourmain, 2007. *Kompilasi Manajemen Otonomi Pendidikan*, Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sallis, Edward, 2010. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Jogjakarta: IRCISoD.
- Umiarso & Gojali, Imam, 2010. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, Jogjakarta: IRCISoD.